

**LATAR BELAKANG WAJIB BELAJAR MASA ORDE BARU TAHUN 1984****GALUH DEWI CAHYANINGSIH**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [wysnuari@gmail.com](mailto:wysnuari@gmail.com)

**Artono**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Latar Belakang Wajib Belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun masa Orde Baru tahun 1984 memiliki beberapa alasan diantaranya dari segi pendidikan meningkatnya angkatan kerja di Indonesia yang hanya berpendidikan sekolah dasar atau bahkan lebih rendah yaitu tidak tamat sekolah dasar. Dari segi ekonomi upaya peningkatan sumber daya manusia dapat memberi nilai tambah lebih terhadap pertumbuhan ekonomi dimungkinkan dapat memperluas wawasan dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara beranekaragam. Dari segi kepentingan peserta didik peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidup.

Penelitian ini menjelaskan tentang: 1) Mengapa ada Gerakan Wajib Belajar masa Orde Baru? 2) Bagaimana pelaksanaan Gerakan Wajib Belajar masa Orde baru? Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup empat tahapan yaitu mengumpulkan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi

Berdasarkan laporan gerakan wajib belajar yang dilaksanakan sejak tahun 1984/ 1995 sampai akhir Pelita V menunjukkan keberhasilan Pemda DKI Jakarta dalam rangka penuntasan wajib belajar. Dalam awal Pelita VI (Tahun 1994/ 1995) angka partisipasi murni (APM) dapat dicapai sebesar 99.25% yang berarti penduduk usia 7-12 tahun yang tidak/ belum sekolah relatif kecil (0,75%), sedangkan untuk tahun 1995/ 1996 APM mencapai sebesar 99. 26% berarti mengalami kenaikan 0,01% dengan jumlah murid usia 7- 12 tahun sebanyak 1. 025. 879 dibanding dengan jumlah penduduk usia 7- 12 tahun sebesar 1. 033. 497 sehingga yang tidak/ belum sekolah relatif lebih kecil yaitu 0,74% (7618 anak).

**Kata Kunci: Repelita, Wajib Belajar, Orde Baru****Abstract**

*Background Compulsory Education from 6 to 9 years of the New Orde in 1984 has several reasons including in terms of increasing workforce education in Indonesia only primary school education or even lower is not completed primary school. From an economic point of efforts to increase human resources can provide more added value to economic growth is possible can expand horizons in creating diverse economic activities. From the perspective of the learners increase compulsory school age from 6 years to 9 years will provide a higher maturity in the acquisition of knowledge, abilities, and skills will increase the chances that a more equitable to increase the dignity, well-being, as well as the meaning of life.*

*This study describes: 1) Why is there a compulsory movement of the New Orde? 2) How is the implementation of the Compulsory Education Movement New Orde era? This study uses historical research that includes four stages, namely gathering source, source criticism, interpretation, and historiography*

*Based on reports of compulsory education movement undertaken since 1984/1995 to the end of Pelita V shows the success of the Jakarta Government in orde compulsory. In early Pelita VI (Year 1994/1995) the net enrollment rate (APM) can be achieved by 99.25%, which means the population aged 7- 12 years who did not/ not attending school is relatively small (0.75%), while for the year 1995/1996 APM reached 99. 26% means an*

increase of 0.01% with the number of pupils aged 7- 12 years by 1. 025. 879 compared with the total population aged 7- 12 years of 1. 033. 497 that is not / yet relatively more schools small ie 0.74% (7618 children).

**Keywords:** *Repelita, Compulsory, New Orde*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Umumnya orang percaya bahwa dengan pendidikan umat manusia dapat memperoleh peningkatan dan kemajuan baik dibidang pengetahuan, kecakapan, maupun sikap dan moral. Anggapan seperti yang dikemukakan tersebut akan memantapkan dan memperkokoh arti pendidikan dalam upaya menciptakan peningkatan kualitas peserta didik atau yang lebih dikenal upaya pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam era memasuki abad 21 yaitu abad globalisasi.<sup>1</sup> Memperhatikan peranan dan misi pendidikan bagi umat manusia dalam mengembangkan dan mengoptimalkan segenap potensi individu supaya dapat berkembang secara maksimal sudah selayaknya diberikan karena setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut maka sistem pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Dengan demikian, dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik, tidak dibenarkan adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan atas jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.

Kondisi pendidikan di masa depan terdapat berbagai alasan yang melatar belakangi terciptanya wajib belajar 9 tahun yakni sekitar 73,7% angkatan kerja Indonesia pada tahun 1992 hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau lebih

rendah, yaitu mereka tidak tamat Sekolah Dasar, dan tidak pernah sekolah jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura. Dari sudut pandang kepentingan ekonomi, pendidikan dasar 9 tahun merupakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat memberi, nilai tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata pendidikan dasar 9 tahun, dimungkinkan bagi mereka dapat memperluas wawasannya dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara lebih beranekaragam (diversified). Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Dengan meningkatnya penguasaan kemampuan dan keterampilan, akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidupnya. Semakin meluasnya kesempatan belajar 9 tahun, maka usia minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor industri.<sup>2</sup>

Melihat alasan-alasan yang melatar belakangi dicanangkan program-program pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dapat memberikan gambaran bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberi nilai tambah pada diri individu (masyarakat) itu sendiri mengenai penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, yang dapat mengantarkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas kerja, martabat, dan kesejahteraan hidupnya. Berbagai alasan

<sup>1</sup> Komunitas Pemerhati Pendidikan. *Pendidikan Wajib 9 Tahun dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Di poskan tanggal 07 November 2009, diakses tanggal 12 Februari 2014 jam 10.13.

<sup>2</sup> ibid

yang melatar belakangi gerakan wajib belajar 9 tahun hanya dapat dicapai lewat penuntasan pelaksanaan pendidikan untuk semua.

### Rumusan Masalah

1. Mengapa ada Gerakan Wajib Belajar masa Orde Baru?
2. Bagaimana pelaksanaan Gerakan Wajib Belajar masa Orde baru?

### Tujuan

1. Menjelaskan latar belakang Gerakan Wajib Belajar masa Orde Baru
2. Menganalisis pelaksanaan Gerakan Wajib Belajar masa Orde Baru

### Batasan Masalah

Berdasar pada judul yang diambil maka peneliti membatasi ruang lingkup tentang kebijakan politik masa Orde Baru yakni "Latar Belakang Wajib Belajar Masa Orde Baru Tahun 1984". Peneliti memilih judul tersebut karena kelanjutan dari adanya Repelita III yang telah memanfaatkan Sumber Daya Alam yang dimiliki masyarakat Indonesia, untuk itu perlu adanya keseimbangan antara Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sebagai wujud dari amanat yang ada pada pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa". Tahun 1984 karena pada tahun tersebut presiden Soeharto memperingati hari Pendidikan Nasional sekaligus membuka Gerakan Wajib Belajar bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia.

### Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul "Gerakan Wajib Belajar Masa Orde Baru Tahun 1984" ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai gerakan wajib belajar 9 tahun masa orde baru.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi yang berminat mengkaji tentang salah satu kebijakan politik presiden Soeharto yang berhasil masa Orde Baru. Selain itu dapat menambah wawasan dan memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan juga memperkaya kajian sejarah terutama mengenai kebijakan politik di Indonesia pada masa orde baru.

Penulis sejarah ini diharapkan juga dapat bermanfaat untuk melengkapi referensi perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, terutama

di perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah. Hal ini berfungsi sebagai bahan informasi bagi seluruh civitas akademik, khususnya mahasiswa sejarah.

### Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat beberapa referensi buku yang membahas tentang gerakan wajib belajar. Pertama adalah buku karangan Supriyadi Sastrosupono yang berjudul *Mengenal Gerakan Wajib Belajar* dalam buku ini menjelaskan tentang pemahaman terhadap arti gerakan wajib belajar yang merupakan kebutuhan bagi siapa saja yang ingin melaksanakan gerakan wajib belajar, ini biasa dikatakan bahwa baik atau tidaknya pemahaman tentang gerakan wajib belajar akan menentukan kualitas dari gerakan wajib belajar.

Kedua, adalah buku karangan Indonesia Departemen Koperasi. Inspektorat Jenderal yang berjudul *Persiapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun* dalam buku ini menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

Ketiga adalah buku karangan Indonesia Departemen Koperasi Inspektorat Jenderal yang berjudul *Persiapan Wajib Belajar dan Pembinaan Sekolah Luar Biasa* yang menjelaskan tentang masalah yang akan dihadapi dan solusinya sampai pada pembinaan sekolah serta persiapan pelaksanaan wajib belajar.

Keempat adalah buku karangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berjudul *Penelitian dan Pengembangan Wajib Belajar Untuk Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Indonesia* yang menjelaskan tentang perencanaan program, pelaksanaan perencanaan operasional sesuai dengan Juklak dan Juknis.

### Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul "Gerakan Wajib Belajar Masa Orde Baru Tahun 1984" penulis menggunakan metode historis atau metode sejarah. Metode tersebut adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Untuk memperoleh data, penulis melakukan langkah- langkah sebagai berikut:

Langkah awal yang dilakukan adalah heuristik. Pada tahap heuristik penulis mencari dan mengumpulkan sumber- sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji mengenai Gerakan Wajib Belajar Masa Orde Baru Tahun



1984. Sumber- sumber yang telah didapat penulis adalah sumber primer berupa artikel pidato presiden Soeharto mengenai gerakan wajib belajar, artikel koran tentang gerakan wajib belajar pada tahun tersebut yakni tahun 1984. Sumber sekunder yang dipakai penulis berasal dari beberapa buku tentang Gerakan Wajib Belajar. Dalam proses mencari dan mengumpulkan sumber- sumber, penulis mengunjungi perpustakaan Nasional di Jakarta, perpustakaan Kampus UNESA di Surabaya. Setelah mendapatkan sumber yang relevan dengan kajian penulis. Di samping membaca dan menelaah sumber- sumber tersebut, penulis mencatat dan memfotocopy data dari artikel koran, buku, dan peraturan.

Langkah kedua adalah melakukan kritik intern. Pada tahap kritik intern penulis melakukan pengujian terhadap isi sumber yang berkaitan dengan Gerakan Wajib Belajar. Cara yang dilakukan adalah dengan menganalisa materi yang didapat agar diperoleh fakta yang terpercaya sehingga dapat digunakan dalam acuan penulisan.

Langkah ketiga adalah Interpretasi, yaitu penulis memberikan penafsiran atau menghubungkan fakta- fakta yang diperoleh dengan merujuk beberapa referensi yang mendukung permasalahan Gerakan Wajib Belajar, sehingga pada akhirnya menjadi suatu rangkaian yang bermakna dan dapat menjawab semua rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR Latar Belakang Wajib Belajar

Wajib belajar pada umumnya diartikan sebagai salah satu kewajiban bagi setiap warga negara untuk menyekolahkan anaknya pada usia tertentu dijenjang persekolahan tertentu. Pelaksanaan Wajib Belajar diatur oleh suatu undang – undang yang disebut Undang – Undang Wajib Belajar yaitu suatu Undang – undang yang mengatur kewajiban dan hak setiap warga negara dalam hubungannya dengan kewajiban belajar serta sanksi – sanksi atau akibat yang harus ditanggung oleh warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban dalam kaitannya dengan wajib belajar. Suatu Negara yang melaksanakan wajib belajar ditingkat sekolah dasar misalnya akan mewajibkan setiap anak yang berusia 6 tahun ( dengan catatan ada surat dari psikolog, tutor paud) atau 7 sampai 12 tahun untuk

Langkah terakhir adalah Historiografi, pada tahap ini penulis telah menyusun ide- ide tentang hubungan satu fakta dengan fakta lain melalui kegiatan interpretasi , kemudian melakukan penulisan atau menyusun cerita sejarah tentang Latar Belakang Wajib Belajar Masa Orde Baru Tahun 1984. Bentuk tulisan disusun secara kronologis dengan topik yang jelas agar pembaca dapat memahaminya dengan mudah.

### Sistematika Penulisan

Sistem Penulisan tentang “Latar Belakang Wajib Belajar Masa Orde Baru Tahun 1984”, secara pokok terbagi menjadi tiga bagian yaitu Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup.

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II : Pembahasan latar belakang Gerakan Wajib Belajar masa Orde Baru .

Bab III : Pembahasan pelaksanaan Gerakan Wajib Belajar masa Orde Baru.

Bab IV : Pembahasan hambatan dan dampak yang terjadi dengan adanya Gerakan Wajib Belajar masa Orde Baru.

Bab V : Penutup yang terdiri dari Simpulan.

bersekolah di sekolah dasar, apabila wajib belajar dilaksanakan sampai tingkat SMP( Sekolah Menengah Pertama) maka setiap anak yang berusia 6 atau 7 sampai 14 atau lebih wajib bersekolah sampai tingkat SMP. Sejalan dengan penjelasan di atas maka tidak seorangpun yang dapat lepas dari pelaksanaan wajib belajar, terkecuali tentunya bagi mereka yang benar – benar tidak dapat dikenakan wajib belajar ( bersekolah) karena alasan jasmaniah atau rokhaniah.<sup>3</sup> Negara – negara yang telah maju, misalnya negara- negara di Eropa, Australia, Jepang dan Amerika Serikat telah melaksanakan Wajib Belajar sampai tingkat SMP, bahkan beberapa negara diantaranya telah pula melaksanakan wajib belajar sampai SMA. Fenomena pendidikan masa kolonialisme yang menempatkan pendidikan kaum bumiputera yang sangat minim dan terbatas. Saat itu ide-ide liberal yang diterapkan bagi anak-anak

<sup>3</sup>Kompas. *Pendidikan Harus Punya Dua Arah*. Hal 5.2 Mei 1984

Belanda dengan menyediakan fasilitas pendidikan secukupnya, tidak dilaksanakan bagi anak-anak Indonesia, selain adanya sejumlah peraturan.

Pada tahap awal Pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun yang pada dasarnya merupakan prasyarat umum bahwa setiap anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) harus dapat membaca,

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12- 15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata. Sesungguhnya gagasan tersebut merupakan upaya yang sangat brilian dari pemerintah yang mencoba menggiring rakyat untuk mengikuti perkembangan yang semakin pesat ini. Tidak relevan jika pada zaman modern ini masih ada anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf. Dengan perkembangan IPTEK yang semakin pesat maka hal tersebut tentu menuntut masyarakat berpikir semakin cerdas dan meningkatkan pendidikannya sehingga tidak akan terbuai oleh zaman dan era globalisasi. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar.

### Bentuk- Bentuk Kebijakan

Dalam sambutan presiden Soeharto mengenai Gerakan Wajib Belajar yang bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional, beliau mengatakan bahwa dasar- dasar pendidikan nasional ialah kecerdasan fikiran, keluhuran budi pekerti, dan semangat kebangsaan. Dengan Gerakan Wajib Belajar ini bangsa Indonesia membuat langkah yang penting untuk mewujudkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam alam kemerdekaan.<sup>4</sup> Sebagai wujud dari Gerakan Wajib Belajar tersebut seluruh anak- anak Indonesia yang berusia 7- 12 tahun wajib memperoleh kesempatan yang sama dan adil untuk menikmati pendidikan dasar, merata di seluruh negri mulai dari yang tinggal di kota- kota hingga yang diam di desa- desa pegunungan terpencil.

<sup>4</sup>Sambutan Presiden Soeharto dalam rangka memperingati Hari pendidikan Nasional. 1984. Jakarta

menulis, dan berhitung. Program Wajib Belajar 6 Tahun yang dicanangkan Pemerintah pada PELITA III tersebut telah memberikan dampak positif dan hasil yang menggembirakan, terutama pada percepatan pemenuhan kualitas dasar manusia Indonesia.

Dasar pelaksanaan wajib belajar adalah amanat pembukaan UUD 1945 alinea ke- 4 mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan hak tiap warga negara memperoleh pengajaran. Dasar ini didukung oleh Tap MPR No. IV/MPR/1978 dan TAP No II/MPR/1983 masih ketinggalan da serta anjuran Kepala Negara pada Rakernas Depdikbud 6 Juni 1983. Untuk maksud itu pemerintah telah banyak melakukan upaya melalui usaha- usaha pembangunan, khususnya pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan. Hal ini dapat dilihat bahwa Pembangunan Lima Tahun ke III masih dititikberatkan pada tingkat Sekolah Dasar sebagai langkah awal, karena sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berada di daerah pedesaan hanya memperoleh pendidikan yang rendah. Dengan pengetahuan yang rendah tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga memiliki kemampuan dan ketrampilan yang amat rendah pula, hal itu dapat dibuktikan bahwa masyarakat lebih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perikanan. Untuk itu dianggap perlu mengambil suatu tindakan berupa kewajiban belajar bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama yang masih dalam usia sekolah sebagaimana tercantum pada dalam pasal 31 Undang- Undang Dasar 1945, bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Untuk meningkatkan kecerdasan bangsa ini ditempuh melalui pendidikan formal dan pendidikan kemasyarakatan yang dikelola pihak pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan ini semua demi tercapainya kebijaksanaan pemerataan pembangunan, khususnya pemerataan untuk memperoleh pendidikan terutama di daerah- daerah terpencil di seluruh pelosok negeri Indonesia.<sup>5</sup>

Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimulai sejak Pelita IV, yakni pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 1984 secara

<sup>5</sup>Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Wajib Belajar untuk Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Indonesia*. 1985. hlm 1

resmi Presiden Soeharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar.<sup>6</sup> Dengan begitu, maka semua orang baik anak-anak maupun dewasa yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan akan menikmati kesempatan belajar. Pendidikan hendaknya menghidupkan potensi generasi pembangunan bukannya melumpuhkan, mengingat selain bertujuan membina watak, sikap atau motivasi pendidikan, pendidikan juga membina kecerdasan dan ketrampilan. Karena itu pendidikan yang diberikan kepada generasi pembangunan harus mempunyai dua arah, yaitu modernisasi berlandaskan budaya bangsa serta integrasi nasional berlandaskan prinsip Bhineka Tunggal Ika.<sup>7</sup> Dasar lainnya bahwa bangsa Indonesia masih ketinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dibanding dengan Amerika, Inggris, Jepang, dan bangsa lain yang sudah maju. Ketertinggalan ini dirasakan menghambat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa digunakan menciptakan sesuatu dalam memanfaatkan kekayaan alam, sarana utama ialah hanya melalui pendidikan.<sup>8</sup>

## PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR

### Pelaksanaan Wajib Belajar Sebelum 1984

Kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan kurikulum pendidikan nasional mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara<sup>9</sup>. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda, karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah “leer

plan”, dalam bahasa Belanda artinya Rencana Pelajaran, lebih populer daripada “curriculum” (bahasa Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional.

#### 1. Rencana Pelajaran 1947

Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajaran. Rencana pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran, yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani

#### 2. Kurikulum 1964

Di penghujung era Presiden Soekarno yakni setelah tahun 1952 menjelang tahun 1964 pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia yang diberi nama Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964, fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Pantja Wardana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi meliputi moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (ketrampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.

#### 3. Kurikulum 1968

Lahirnya Kurikulum 1968 masih bersifat politis sebagai pengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Sebelumnya pada Kurikulum 1964 menekankan Pancasila dan Manipol sebagai asas pendidikan nasional serta menetapkan Pantja Wardana (moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani)<sup>10</sup>. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pantja Wardana menjadi pembinaan pancasila, pengetahuan

<sup>6</sup>Log. Cit. hlm 2

<sup>7</sup> Kompas. *Pendidikan Harus Punya Dua Arah*. hlm 5. 2 Mei 1984. hlm 5

<sup>8</sup> ibid

<sup>9</sup> Glendys\_Apricilia's blog PTIK FATEK UNIMA. *Sejarah Perkembangan Kurikulum Di*

*Indonesia*. Di akses tanggal 21 Juli 2016, jam 13.14 WIB

<sup>10</sup> H.A.R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995), Hlm. 256



dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum awal yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru ini memiliki ciri-ciri: (1) bersifat korelasional (*correlated subject*), artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. (2) Jumlah mata pelajaran SD-10 Bidang Studi, SMP-18 bidang studi (Bahasa Indonesia dibedakan atas Bahasa Indonesia I dan II), SMA jurusan A-18 bidang studi, (3) Penjurusan di SMA dilakukan di kelas II, dan disederhanakan menjadi dua jurusan, yaitu Sastra Sosial Budaya dan Ilmu Pasti Pengetahuan Alam (PASPAL).<sup>11</sup>

#### 4. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif, yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO (*management by objective*)<sup>12</sup>. Berbeda dengan sebelumnya, Kurikulum 1975 menekankan orientasi pada tujuan pendidikan. Hal ini berarti, setiap guru harus mengetahui secara jelas tujuan yang harus dicapai oleh para siswa di dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran dan membimbing siswa untuk melaksanakan rencana tersebut. Jadi disini, Kurikulum 1975 adalah kurikulum pertama yang didasarkan atas tujuan pendidikan yang jelas. Sebagai contohnya, dalam Kurikulum 1975 ada pemetaan dalam hal tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Selain itu, di dalam PPSI juga dijelaskan pedoman prosedur pengembangan alat penilaian yang memberikan petunjuk tentang prosedur penilaian yang akan ditempuh, tentang tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*), tentang jenis tes yang akan digunakan dan tentang rumusan soal-soal tes sebagai bagian dari satuan pelajaran. Tes yang digunakan dalam PPSI disebut *criterion referenced test* yaitu tes yang digunakan untuk mengukur efektifitas program/pelaksanaan pengajaran. Maka dengan melaksanakan PPSI, sistem penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan pelajaran

tertentu. Inilah yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya yang memberikan penilaian pada akhir semester atau akhir tahun saja.

#### Pelaksanaan Wajib Belajar Sesudah 1984 Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar usaha wajib belajar tersebut telah diusahakan berbagai lembaga pendidikan, misal untuk anak normal disediakan dengan SD biasa (konvensional) dan Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan bagi yang bersosial ekonomi lemah disediakan SD Pamong dan Program Kejar Paket A, sementara untuk daerah terpencil dengan penduduk sedikit dilayani lewat SD Kecil. Bagi anak cacat disediakan Sekolah Luar Biasa (SLB A, B, C, D, dan E), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Dasar Terpadu. Di samping itu juga wajib belajar bagi anak-anak cacat dan yang bertempat tinggal di daerah terpencil perlu lebih diperhatikan, untuk itu sangat diperlukan berbagai kemudahan bagi mereka agar bisa mengikuti wajib belajar seperti mendirikan asrama.

Maksud dari pemerintah mendirikan SD Inpres dimana-mana yakni di seluruh tanah air adalah untuk memberikan kesempatan belajar kepada anak usia sekolah, dalam konteks memenuhi amanat yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yakni "Mencerdaskan kehidupan bangsa". Memperoleh pendidikan memang hak warga negara dan warga negara tidak saja berhak memperoleh pendidikan tetapi juga berhak memilih jenis pendidikan yang ditempuhnya.<sup>13</sup>

Dalam perjalanannya diperkirakan terdapat 23.325.000 orang yang pantas mengenyam pendidikan dasar, sementara itu mereka yang sudah bersekolah mencapai 22.182.000 orang atau sekitar 95 persen, ini berarti tinggal 1.143.000 atau 5 persen anak yang belum tertampung. Walau demikian jumlah yang kecil ini tidak berarti mudah dijangkau untuk memperoleh pendidikan, mereka ini justru yang paling sulit karena berada di daerah terpencil,

<sup>11</sup> Ahmad Arifin, *Kurikulum Pendidikan di Indonesia pada Masa Orde Baru Ditinjau dari Sudut Pandang Paulo Freire*, (Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang, Malang: 2014), Hlm. 59

<sup>12</sup> Glendys\_Apricilia's blog PTIK FATEK UNIMA. *Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia*. Di akses tanggal 21 Juli 2016, jam 13.14 WIB

<sup>13</sup> Kompas. Lokasi SD Inpres. 2 Mei 1984. Hal IV

harus membantu orang tua memenuhi kebutuhan keluarga, atau karena alasan cacat.

Hingga akhir Pelita III ini, beberapa sarana penunjang wajib belajar telah tersedia, diantaranya telah terdapat 122.931 SD negeri dan swasta dengan jumlah guru 839.267 orang. Jumlah tersebut belum termasuk pengangkatan guru SD Inpres yang masih dalam proses, sementara itu masih terdapat Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan swasta sebanyak 21.013 buah dengan jumlah guru 42.134 orang. Bagi anak cacat pun telah disediakan sarana pendidikan serupa SLB negeri dan swasta sebanyak 306, SDLB sebanyak 200 buah, dan guru seluruhnya sudah ada 5.000.<sup>14</sup>

Selain dibangunnya sarana dan prasarana sekolah pemerintah juga wajib menyediakan tenaga pengajar, hal tersebut sesuai dengan GBHN 1983 bahwa penyelenggara pendidikan itu bukan guru saja melainkan juga keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan begitu orang tua diakui haknya sebagai pendidik di samping pelbagai organisasi kemasyarakatan.

### Kurikulum Pendidikan

Pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>15</sup> Sebagai perwujudan cita-cita nasional tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam dan oleh keluarga, termasuk pendidikan agama, nilai budaya, nilai susila, dan norma perilak. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan. Jenjang pendidikan yang merupakan jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

pendidikan tinggi. Pendidikan dasar adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya 9 (sembilan) tahun yang diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di sekolah dasar (SD) dan 3 (tiga) tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat.

Kurikulum pendidikan dasar disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian. Kurikulum pendidikan dasar yang berkenaan dengan sekolah dasar (SD) menekankan kemampuan dan ketrampilan dasar “Baca- Tulis- Hitung”, pengetahuan dan ketrampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di SLTP. Sebagaimana tercermin dalam kemampuan dan ketrampilan penggunaan bahasa (“Baca- Tulis- Bicara”) serta berhitung (menambah, mengurangi, mengalikan, membagi, mengukur sederhana dan memahami bentuk geometri) yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum pendidikan dasar yang berkenaan dengan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) lebih menekankan pada kemampuan siswa untuk menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan lingkungan. Penguasaan tersebut akan memudahkan siswa mengembangkan berbagai kemampuannya secara bertahap seperti berfikir teratur dan kritis, memecahkan masalah sederhana, serta sanggup dan bersikap mandiri dalam kebersamaan.

Kurikulum ini berlaku bagi semua satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum satuan pendidikan dasar pada jalur luar sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan yang setara dengan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama merupakan kurikulum pendidikan dasar pada jalur pendidikan sekolah dengan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Pendidikan dasar yang diselenggarakan di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan

<sup>14</sup> Kompas. Awal Pendidikan Untuk Semua Orang. 2 Mei 1984. Hal 4

<sup>15</sup> Indonesia Departemen Koperasi Inspektorat Jenderal. *Wajib Belajar Sembilan Tahun Dilengkapi*

*Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah*. 1993. CV. Mini Jaya Abadi. Hal 47



pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh di sekolah dasar yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah.

Kurikulum pendidikan dasar disusun untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Kurikulum pendidikan dasar merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD dan SLTP. Isi kurikulum pendidikan dasar wajib memuat sekurang- kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika (termasuk berhitung), pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, menggambar, serta bahasa Inggris.<sup>16</sup>

Sebutan- sebutan tersebut di atas bukan nama mata pelajaran melainkan sebutan yang mengacu pada pembentukan kepribadian dan unsur-unsur kemampuan yang diajarkan dan dikembangkan melalui pendidikan dasar. Lebih dari satu unsur tersebut dapat digabung dalam satu mata pelajaran atau sebaliknya, satu unsur dapat dibagi lebih dari satu mata pelajaran. Mata pelajaran merupakan satu atau sekumpulan bahan kajian dan bahan pelajaran yang memperkenalkan konsep, pokok bahasan, tema, dan nilai, yang dihitung dalam satu kesatuan disiplin pengetahuan (ilmu pengetahuan).

## IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR

### A. Hambatan

#### Letak Geografis

Sesuai dengan keadaan bahwa negara kita merupakan negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Dengan tersebarnya pulau- pulau tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa tersebar pula penduduk Indonesia dari dahulu hingga sekarang. Hal itu ditambah lagi dengan kenyataan masih banyaknya penduduk yang belum menikmati pendidikan, hal tersebut dikarenakan

belum terjangkau tempat tinggal mereka.<sup>17</sup> Dengan keadaan geografis masyarakat Indonesia seperti itu yang merintangai tersebar luasnya kesempatan pendidikan secara merata. Oleh sebab itu jangan heran kalau kita menemui suatu kelompok masyarakat yang belum mengenal dunia sekolah, bukan mereka yang tidak mau atau tak mau tahu akan tetapi karena letak tempat tinggal mereka yang tak mungkin dijangkau sarana pendidikan.

#### Perekonomian Keluarga

Keadaan perekonomian keluarga penduduk Indonesia dari dahulu sampai sekarangpun sangat sederhana, karena pola pikiran masyarakat Indonesia yang penting dapat makan, dan bekerja ala kadarnya. Hal tersebut bisa dimengerti karena hampir 80% masyarakat Indonesia adalah petani. Meskipun masyarakat kita lebih mayoritas petani, namun kehidupan kondisi kaum petani sangat memprihatinkan. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki tanah garap yang luas, hal tersebut berdasar pada penelitian beberapa tahun lalu yakni dari sebelas juta rumah tangga petani yang memiliki tanah garap luas tidak lebih dari setengah hektar.<sup>18</sup> Dengan adanya kondisi yang seperti itu bisa dibayangkan keadaan perekonomian masyarakat Indonesia. Dalam keadaan yang seperti itu tentu saja pikiran dan perbuatan lebih berpusat pada masalah pangan dan kerja untuk sesuap nasi demi mempertahankan hidup. Soal pendidikan dengan sendirinya tidak mendapat perhatian sewajarnya, bahkan dianggap tidak penting. Di samping itu juga karena masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan.

#### Kurikulum Pendidikan

Gerakan wajib belajar tidak ingin sekedar menjejalkan pengetahuan hafalan, tetapi sekaligus menumbuhkan sikap dan kemampuan nalar tinggi sehingga seseorang dapat memecahkan masalah lewat sistem pendidikan yang diterimanya. Kebutuhan kurikulum yang tuntas amat jelas kentara bagi gerakan ini mengingat bahwa tidak semua orang akan menyelesaikan seluruh program wajib belajar, di samping kenyataan keanekaragaman golongan dan tingkat kecerdasan peserta didik. Dengan adanya hal tersebut jika tidak diciptakan kurikulum terpadu maka akan sulit diharapkan pengetahuan yang utuh dan wawasan yang

<sup>16</sup> log.cit. Hal 50

<sup>17</sup> Sastrosupono. M, Supriyadi. *Mengenal Gerakan Wajib Belajar*. 1984. Bandung: Penerbit Alumn

<sup>18</sup> log cit. Hal18

bermanfaat bagi permasalahan yang ada pada masyarakat.

### **B.Dampak**

#### **Bagi Masyarakat**

1. Ikut menciptakan suasana kebutuhan akan pendidikan sehingga memasukkan anak ke sekolah bukan lagi dipandang sebagai suatu kerugian tenaga kerja melainkan suatu investasi untuk masa depan.
2. Masyarakat khususnya para terdidik ikut aktif alam pelaksanaan Kejar (Kelompok Belajar), sebab bagaimana pun juga jumlah anak usia sekolah yang hampir 24 juta dengan cara hidup yang beraneka ragam, dan tempat pemukiman yang tersebar tidak

#### **Bagi Pemerintah**

1. Sejak tahun 1984/ 1995 sampai akhir Pelita V menunjukkan keberhasilan Pemda DKI Jakarta dalam rangka penuntasan wajib belajar. Dalam awal Pelita VI (Tahun 1994/ 1995) angka partisipasi murni (APM) dapat dicapai sebesar 99.25% yang berarti penduduk usia 7- 12 tahun yang tidak/ belum sekolah relatif kecil (0,75%), sedangkan untuk tahun 1995/ 1996 APM mencapai sebesar 99. 26% berarti mengalami kenaikan 0,01% dengan jumlah murid usia 7- 12 tahun sebanyak 1. 025. 879 dibanding dengan jumlah penduduk usia 7- 12 tahun sebesar 1. 033. 497 sehingga yang tidak/ belum sekolah relatif lebih kecil yaitu 0,74% (7618 anak). Keberhasilan pelaksanaan wajib belajar karena adanya peran aktif dari semua pihak (orang tua, masyarakat, dan pemerintah).
2. Teratasinya masalah- masalah tidak tertampungnya massa yang membutuhkan pengajaran.
3. Stabilitas dan keamanan masyarakat dan pemerintah terjamin.
4. Tanggapan masyarakat dan partisipasi masyarakat terhadap program.

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Latar Belakang Wajib Belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun masa Orde Baru tahun 1984 memiliki beberapa alasan diantaranya dari segi pendidikan meningkatnya angkatan kerja di Indonesia yang hanya berpendidikan sekolah dasar atau bahkan lebih rendah yaitu tidak tamat sekolah dasar. Dari segi ekonomi upaya peningkatan sumber

tersebut mungkin seluruhnya dapat ditampung di dalam gedung sekolah formal.

3. Mau berkorban menyediakan tempat atau tanah untuk lokasi gedung SD, sebab pertumbuhan penduduk dengan sendirinya memerlukan penambahan gedung sekolah, sedang tanah untuk lokasi gedung sekolah semakin sulit didapat di daerah- daerah pemukiman. Kiranya dengan partisipasi masyarakat seperti di atas, lonceng Gerakan Wajib Belajar yang dicanangkan tidak akan melemah dan akhirnya hanya sayup- sayup di kejauhan, tetapi akan semakin nyaring di seluruh Tanah Air.

daya manusia dapat memberi nilai tambah lebih terhadap pertumbuhan ekonomi dimungkinkan dapat memperluas wawasan dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara beranekaragam. Dari segi kepentingan peserta didik peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidup.

Berdasarkan laporan gerakan wajib belajar yang dilaksanakan sejak tahun 1984/ 1995 sampai akhir Pelita V menunjukkan keberhasilan Pemda DKI Jakarta dalam rangka penuntasan wajib belajar. Dalam awal Pelita VI (Tahun 1994/ 1995) angka partisipasi murni (APM) dapat dicapai sebesar 99.25% yang berarti penduduk usia 7- 12 tahun yang tidak/ belum sekolah relatif kecil (0,75%), sedangkan untuk tahun 1995/ 1996 APM mencapai sebesar 99. 26% berarti mengalami kenaikan 0,01% dengan jumlah murid usia 7- 12 tahun sebanyak 1. 025. 879 dibanding dengan jumlah penduduk usia 7- 12 tahun sebesar 1. 033. 497 sehingga yang tidak/ belum sekolah relatif lebih kecil yaitu 0,74% (7618 anak). Keberhasilan pelaksanaan wajib belajar karena adanya peran aktif dari semua pihak (orang tua, masyarakat, dan pemerintah).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kompas. Awal Pendidikan Untuk Semua Orang. 2 Mei 1984. Hal 4  
 Kompas. Lokasi SD Inpres. 2 Mei 1984. Hal IV  
 Kompas. Pendidikan Harus Punya Dua Arah. Hal 5.2 Mei 1984

Sambutan Presiden Soeharto dalam rangka memperingati Hari pendidikan Nasional. 1984. Jakarta

Indonesia Departemen Koperasi Inspektorat Jenderal. *Wajib Belajar Sembilan Tahun Dilengkapi Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah*. 1993. CV. Mini Jaya Abadi.

Ace dan Tilaar. 1994. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Arifin, Ahmad. *Kurikulum Pendidikan di Indonesia pada Masa Orde Baru Ditinjau dari Sudut Pandang Paulo Freire*, (Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang, Malang: 2014)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Wajib Belajar untuk Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Indonesia*. 1985.

Sastrosupono, Supriyadi. *Mengenal Gerakan Wajib Belajar*. 1984. Palumni: Bandung.

Tilaar, H.A.R. 1995. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Komunitas Pemerhati Pendidikan. *Pendidikan Wajar 9 Tahun dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Di poskan tanggal 07 November 2009, diakses tanggal 12 Februari 2014 jam 10.13.

Glendys\_Apricilia's blog PTIK FATEK UNIMA. *Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia*. Di akses tanggal 21 Juli 2016, jam 13.14 WIB

